

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Alfitra. 2018. *Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Apeldoorn, L.J. Van. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Arief, Barda Nawawi. 1999. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*. Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

_____. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

_____. 2011. *PELAJARAN HUKUM PIDANA 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Penindakan, Pemberatan & Peringatan Pidana, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Hamzah, Andi dan Irdan Dahlan. 1987. *Upaya Hukum dalam Perkara Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ibrahim, Johny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Iswanto. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Purwokerto: UPT. Percetakan dan Penerbitan.
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lebacqz, Karen. 2013. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung: Nusa Media.
- Marpaung, Leden. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 1996. *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2004. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Media Grafika.
- _____. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi)*. Jakarta: Sinar Grafka Offset.

Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 1986. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

_____. 2000. (*Edisi Revisi*) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Napitupulu, Eramus A.T. dan Supriyadi W. Eddyono. 2017. *Korban Pelecehan Yang Menjadi Tersangka Pasal 27 Ayat (1) UU ITE*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Poernomo, Bambang. 1988. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Simanjuntak, Osman. 1995. *Teknik Penuntutan dan Upaya Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.

_____. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Soeparman, Parman. 2007. *Pengaturan Hak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sudarto. 2009. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.

Suhariyanto, Budi. 2014. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sunarso, Siswanto. 2015. *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tahir, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska.

B. Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Jurnal

A.P. Edi Atmaja, “*Kedaulatan Negara Di Ruang Maya: Kritik UU ITE Dalam Pemikiran Satripto Rahardjo*”, Jurnal *Opinio Juris*, Vol. 16, Mei-September 2014, Jakarta: Direktorat Jenderal dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri.

Fance M. Wantu, “*Antinomi Dalam Penegakkan Hukum Oleh Hakim*”, Jurnal berkala *Mimbar Hukum*, Vol.19, No. 3, Oktober 2007, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

John Kenedi, “*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)*”, Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Vol. 2, No. 1, 2017, Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Pascasarjana IAIN Bengkulu.

L. Heru Sujamawardi, “*Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol.9, No. 2, April 2018, Bandung: Faculty of Law Maranatha Christian University.

Muhammad Iftar Aryaputra, Ani Triwati, Subaidah Ratna Juita, “*Kebijakan Aplikatif Penjatuhan Pidana Denda Pasca Keluarnya Perma No. 2 Tahun 2012*”, Jurnal *Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 1, Juni 2017, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Semarang.

Sigit Agung Susilo, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Penyalahgunaan BBM Subsidi di Nusa Tenggara Timur*”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No.3, Juli 2016, Kupang: Program Pasca Sarjana Universitas Nusa Cendana.

D. Internet

Mikhael Gewati, *Ini Alasan DPR Setujui Amnesti Baiq Nuril*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/07/25/17573351/ini-alasan-dpr-setujui-amnesti-baiq-nuril?page=all>., diakses 5 Mei 2020, pukul 10.00 WIB.